

Pengaruh Agama pada Masyarakat Indonesia dalam Melaksanakan Pemilihan Umum

Evan Glen Widjaja; Steven Yehezkiel; Muhammad Darren Husaini; Andryanto Lim. Universitas Pradita, muhammad.darren@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: As the 2024 general elections approach in Indonesia, the influence of religion on societal preferences becomes increasingly pronounced. This study aims to provide a concise explanation of the phenomenon of religion as a determining factor in the electorate's decision-making process. Employing a qualitative method, data is categorized into primary and secondary, with primary data sourced from books and journals, and secondary data from news articles published online. Data collection is conducted through literature review. Upon data compilation, presentation, and subsequent analysis, the study concludes that the influence of religion as an identity marker is not merely a commonplace occurrence during elections but has evolved into a phenomenon that threatens the unity of the Republic of Indonesia (NKRI). The influence of religion elicits various reactions or responses within society. However, it can have both positive and negative impacts during elections. Positive effects include inter-group tolerance, while negative effects encompass suspicion, conflict, and division. Nevertheless, the study argues that the influence of religion, in any form and magnitude, will not detrimentally affect the electoral process as long as it does not contravene constitutional principles.

KEYWORDS: Influence, Elections, Religion, Society, Indonesia.

ABSTRAK: Menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024 di Indonesia, kental sekali pengaruh agama terhadap preferensi masyarakat. Studi ini akan menjelaskan secara singkat tentang fenomena agama yang menjadi pengaruh terhadap masyarakat dalam melaksanakan pemilihan umum. Studi ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif. Data dikelompokkan menjadi data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh dari buku dan jurnal, sedangkan data sekunder dari artikel berita yang diterbitkan di internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan literatur. Setelah data dikumpulkan, disajikan, dan kemudian diambil kesimpulan. Hasil dari studi ini mengerucut bahwa pengaruh agama sebagai identitas bukan hanya fenomena biasa pada pemilihan umum, tetapi telah menjadi fenomena yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Pengaruh agama memunculkan beragam reaksi atau respons di masyarakat. Hanya saja, pengaruh agama dapat memiliki dampak positif, namun juga bisa negatif di masa pemilihan umum. Toleransi antar kelompok adalah dampak positif, sementara kecurigaan, konflik, dan perpecahan adalah dampak negatif. Namun, studi ini berargumen bahwa pengaruh agama dalam bentuk dan skala apapun tidak akan merugikan pemilihan umum selama tidak menggunakan cara yang bertentangan dengan konstitusi.

KATA KUNCI: Pengaruh, Pemilihan Umum, Agama, Masyarakat, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang telah merdeka dan memiliki wilayah yang luas, memiliki identitas yang membedakannya dari negara-negara lain. Identitas nasional berperan dalam menjaga kelangsungan dan eksistensi negara. Indonesia juga memiliki wibawa dan kehormatan yang setara dengan negara-negara lain. Identitas nasional menjadi bagian dari jati diri Indonesia, yang terbentuk melalui proses sejarah panjang mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan. Saat ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk dengan keanekaragaman suku, etnis, agama, ras, dan budaya.

Agama adalah kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual, misalnya roh, jiwa, dan hal-hal lain yang punya peran dalam kehidupan manusia, (Edward Burnett Tylor, 1996). Di Indonesia sendiri agama yang diakui terdiri dari 6 agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam konteks masyarakat Indonesia secara keseluruhan, antropologi agama sebagai sebuah disiplin ilmu masih kurang dikenal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yang terutama adalah kurangnya minat masyarakat terhadap kajian-kajian agama dalam hubungannya dengan budaya, padahal perilaku-perilaku keagamaan, disadari atau tidak telah menjadi salah satu sumber terbentuknya kebudayaan, begitu pula sebaliknya, bahwa kebudayaan asal suatu daerah sedikit banyak telah mempengaruhi perilaku keagamaan manusia.

Menurut Soekarno (1945) Kondisi aktual kehidupan politik kebangsaan saat ini telah mendorong kesadaran semua pihak untuk melakukan upaya nyata untuk melakukan penegasan dan peningkatan pemahaman kembali nilai-nilai kebhinekaan dalam bingkai Pancasila sebagai dasar Negara, karena berdasarkan sejarah bangsa Indonesia telah terbukti bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama kepada semua orang, masing-masing menurut agama atau keyakinan sendiri.

Konstitusi ini juga menetapkan bahwa negara Indonesia harus didasarkan pada keyakinan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa kondisi tersebut juga merupakan prinsip pertama Pancasila, yaitu filosofi negara Indonesia.

Kusmayadi Edi (2015) menyatakan bahwa Indonesia memberikan kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia. Budaya politik diartikan sebagai sikap, nilai, informasi, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu atau kelompok, dan kemudian membentuk orientasi terhadap proses dan sistem politik. Dengan kata lain, budaya politik menentukan partisipasi seseorang dalam kaitannya dengan proses politik. pola orientasi politik yang dikaitkan dengan tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik warga masyarakat yang diidentifikasi dalam tiga pola, yaitu partisipan, subjek, dan parokial. masyarakat yang berbudaya partisipan adalah masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan politik dan tingkat partisipasi politik yang tinggi, serta senantiasa terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik.

Sebaliknya, masyarakat yang memiliki pengetahuan cukup dan terkadang turut serta dalam aktivitas politik meskipun tidak menentukan proses politik disebut sebagai masyarakat berbudaya subjek. Sementara itu, masyarakat yang tidak aktif dalam politik atau keterlibatannya di dalam politik hanya lima tahun sekali, karena memiliki tingkat pengetahuan politik yang rendah disebut sebagai masyarakat berbudaya parokial. (Kusmayadi Edi, 2015).

Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam kehidupan negara. Begitu pula dengan agama, yang diakui sebagai kebutuhan esensial manusia yang bersifat universal. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme untuk menggali keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara ke depan. (Morissan, 2005). Karena itu, agama merupakan kesadaran spiritual yang di dalamnya ada satu kenyataan di luar kenyataan yang tampak ini, yaitu bahwa manusia selalu mengharap belas kasihan-Nya, bimbingan-Nya, serta belaian-Nya, yang secara ontologis tidak bisa diingkari, walaupun oleh manusia yang mengingkari agama (komunis) sekalipun. (F.M, Saefuddin, 1987).

Agama berkaitan dengan pemilu, pengaruh pada cara berpikir seseorang dalam mempertimbangkan untuk memilih kepala daerah dengan alasan agama. Terkait dengan kecenderungan memilih kandidat dengan menggunakan sentimen agama, maka kita bisa berhipotesis bahwa orang yang lingkaran sosial yang sejenis menjadi pertimbangan utama. Sedangkan orang yang memiliki social bridging yang lebih besar maka kemungkinan kecil memilih kandidat berdasarkan agama. (Sirojuddin, 2020). fakta menarik di lapangan justru menunjukkan bahwa politik identitas kerap ditemukan di wilayah yang memiliki keragaman. Politik identitas justru marak di kabupaten dan kota yang lebih heterogen dibandingkan dengan yang homogen. (Burhanuddin, 2020).

Politik Identitas sendiri tidak sesuai dengan ideologi pancasila karena sejatinya pancasila merupakan wujud dari implementasi kebhinekaan tunggal ika yang didalamnya memiliki makna keragaman tapi tetap satu. Isu politik identitas itu juga tidak lepas dari upaya untuk mengkreditkan kelompok agama tertentu dan umumnya untuk kelompok agama Islam, karena isu politik identitas dinilai sangat jitu sebagai black campaign untuk melumpuhkan rival politik, upaya elit politik tertentu dengan motif niat jahat menyebarkan kebencian dan berita yang tidak kredibel untuk meraih popularitas dan menjatuhkan tokoh kandidat lawan tanding yang dinilai sangat kuat dan mendapat simpati masyarakat luas terutama pemilih terbesar umat Islam.

Dilihat dari kuatnya agama yang turut memengaruhi keadaan sosial politik dan kondisi aktual negara Indonesia yang sedang dalam masa Pemilu 2024 membawa universitas Brawijaya membahas dalam jurnalnya terkait pemilu serentak dan masa depan konsolidasi demokrasi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Agama pada Masyarakat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum.

B. Landasan Teori

1. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu adalah metode yang di dalamnya mengandung suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan. Kemudian diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai dan para kandidat. Pemilu merupakan sarana penting untuk memilih wakil rakyat yang bekerja dalam proses pembuatan kebijakan negara. (Andrew Reynolds, 2022).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Peran Agama terhadap Negara Indonesia

Di Indonesia sendiri keterkaitan agama dalam politik sudah tidak bisa dilepaskan karena kedua entitas tersebut memiliki proses tarik menarik kepentingan. Agama memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai serta norma dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan masyarakat. Negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara agar mematuhi aturan-aturan yang ada. Adanya hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan saling mendominasi antara dua entitas tersebut. (Muhamad Abrar Ghifari, 2020).

Sebagai negara demokrasi Indonesia dengan berbagai macam budaya, agama, suku, bahasa dan kepercayaan sekaligus dengan tingkat disparitas regional, sosial ekonomi yang masih tinggi, Indonesia memiliki potensi agung sekaligus tantangan besar dalam perjalanannya menuju cita-citanya sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi. Dengan berbagai macam perbedaan yang ada tidak jarang agama sering dijadikan sebagai instrumen pemecah sosial. Di samping agama, terdapat varian lain yang turut berperan dalam

konvergensi sosial berbangsa dan bernegara. Walaupun kadang dijadikan sumber konflik oleh umat beragama, agama telah berfungsi instrumental membentuk Indonesia modern yang damai dan maju. Konstruksi sosial budaya Indonesia tak dapat dipisahkan dari agama.

Di Indonesia agama berperan penting dalam hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya dalam kehidupan praksis tapi juga dan bahkan dalam pembentukan berbagai peraturan perundang undangan. Namun demikian, negara hanya dapat memfasilitasi umat beragama dalam menjalankan agamanya. Negara tidak dapat memaksakan sebuah ajaran agama untuk dilaksanakan. Negara pun tidak dapat menjadi pemutus mutlak terhadap perbedaan menyangkut implementasi agama di ruang-ruang publik. (Kamaruddin Amin, 2023).

3. Politik Identitas

Politik identitas adalah sebuah cara berpolitik yang didasarkan pada kesamaan identitas, dalam buku Sejarah Sosial Pendidikan Islam dengan penerbit Guepedia (2022) politik identitas memiliki arti pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu.

Politik identitas merupakan politik yang memiliki dasar utama dilakukan untuk merangkul kesamaan mulai dari agama, etnis, ras, hingga jenis kelamin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas ini merupakan politik yang didasari untuk merangkul persamaan-persamaan dari suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya untuk mendapatkan pengakuan atas identitas kelompok. Atau bisa juga untuk meninggikan martabat dan derajat golongan (Abdillah, 2002).

Dalam beberapa kasus, politik identitas dapat membantu untuk memperjuangkan hak-hak kelompok terpinggirkan dan memperkuat solidaritas di antara mereka. Namun, dalam banyak kasus, politik identitas juga dapat menimbulkan bahaya bagi keberagaman dan persatuan masyarakat. Dampak buruk yang dapat

ditimbulkan dalam politik identitas antara lain, Kebijakan yang tidak inklusif, Eksploitasi politik, Radikalisasi, Diskriminasi, dan pemisahan (Andy Sianipar, 2023).

Dilansir dari harian Kesbang (2023) pada pemilu 2024 ini dikhawatirkannya banyak anjang-ancang gerakan politik dengan memanfaatkan keterlibatan identitas individu yang tidak disadari oleh masyarakat. Semakin mendekati Pemilu 2024, isu-isu politik semakin meningkat salah satunya tentang politik identitas. Menurut Abdillah, politik identitas adalah kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu baik dari etnis, ras, suku, hingga agama. Dampak dari politik identitas juga cukup serius karena bisa menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi.

Politik Identitas adalah konsep yang memfokuskan pada perbedaan dalam asumsi tubuh, etnis, primordialisme, agama, bahasa, dan faktor lainnya. Dalam literatur ilmu politik, terdapat dua pemahaman yang relevan:

- 1) Politik Identitas sebagai Perbedaan: Politik identitas menyoroti perbedaan sebagai kategori politik utama. Ini melibatkan konstruksi identitas politik dan sosial yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam suatu komunitas politik. Fokus pada perbedaan ini dapat memunculkan bentuk kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain, tetapi juga berpotensi mengakibatkan intoleransi dan konflik.
- 2) Politik Identitas sebagai Alat Manipulasi: Para pemimpin sering menggunakan politik identitas sebagai retorika politik. Mereka membagi masyarakat menjadi “kami” (orang asli) dan “mereka” (orang pendatang) untuk memperoleh dukungan dan memenuhi kepentingan ekonomi dan politik mereka. Politik identitas juga dapat menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik.

Dengan demikian, politik identitas melibatkan pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Pemahaman ini membantu

kita memahami bagaimana perbedaan dan kesamaan identitas memengaruhi dinamika politik di berbagai konteks, termasuk di Indonesia. (Dwiloka, B. & Rati Riana, 2005).

4. Ciri-ciri Politik Identitas

Ciri-ciri politik identitas yang terkait dengan agama dan pemilu dapat dilihat dalam beberapa hal. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih, seperti yang ditemukan dalam jurnal “DAS SOLLEN: JURNAL KAJIAN KONTEMPORER HUKUM DAN MASYARAKAT (2023)”, terdapat beberapa ciri-ciri politik identitas yang terkait dengan agama dan pemilihan umum,

- a. Dimensi Bridging: Dimensi bridging berarti pergaulan yang baik antara satu kubu dengan kubu lain. hal ini dapat dilihat dalam bagaimana agama dijadikan faktor yang penting dalam masyarakat sebagai penentuan calon presiden yang baik maupun partai politik yang didukung oleh masyarakat.
- b. Dimensi Bonding: dimensi bonding memiliki hubungan sosial pada kelompok yang bersifat homogen dalam pandangan etnis dan agama sehingga agama pun masih menjadi faktor yang lumayan berpengaruh dalam pemilihan masyarakat
- c. Persepsi individu: setiap individu di muka bumi memiliki persepsi masing-masing, hak suara yang akan mereka gunakan dalam pemilihan terutama dalam pemilihan umum, tetapi tidak banyak juga yang memiliki persepsi bahwa setiap pemimpin harus dipilih berdasarkan agama yang seiman dengan pemilih, terutama dengan mayoritas agama yang ada di indonesia yaitu agama islam. (Survei SMRC: Faktor Agama Masih Menentukan dalam Pemilu 2024, 2022). Agama masih menjadi faktor yang menentukan pilihan politik masyarakat dalam pemilu presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg).
- d. Keterlibatan Masyarakat: menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat pada proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang terdapat di dalam

masyarakat, dengan pilihan dan pengambilan keputusan untuk solusi penyelesaian masalah yang dirasakan.

- e. Keterkaitan dengan Norma-norma: indonesia memiliki aturan yang ketat walaupun atasan kadang melanggar, pemilihan umum yang terjadi di indonesia dapat berjalan sesuai dengan arahan dan aturan terkait norma-norma yang berlaku, pemerintahan dan masyarakat juga dapat berperan mengembangkan program-program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih presiden dan wakil presiden yang bertanggung jawab tanpa adanya kaitan politisasi agama seperti yang terjadi beberapa kali ketika diadakannya pemilu.

5. Dampak Politik Identitas

Terdapat dampak dari politik identitas yang juga bersifat merugikan, berdasarkan hasil analisis jurnal berjudul “DAMPAK POLITIK IDENTITAS PADA PEMILIHAN UMUM 2024 MENDATANG” yang diteliti oleh Andre Pebrian Perdana atas beberapa teori dan fakta sosial politik yang terjadi, berikut merupakan dampak politik identitas bagi NKRI:

a. Mengancam Keutuhan NKRI

Meningkatnya Politik identitas memicu kekhawatiran terhadap persatuan NKRI yang mulai memecah-belah identitas sesama, serta menimbulkan pertanyaan mengenai ideologi yang dapat merusak persatuan nasional. Praktik-praktik politik Identitas dapat mendorong perpecahan NKRI, karena penekanan pada superioritas atau fanatisme terhadap identitas tertentu dapat menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Menimbulkan Polemik Adu Domba/Perpecahan

Munculnya politik identitas di kalangan masyarakat membawa serta ujaran kebencian dan berita bohong yang dapat menimbulkan berbagai pendapat dan pada akhirnya menimbulkan berbagai kontroversi di tengah masyarakat.

c. Membentuk Polarisasi

Setelah terjadinya polemik di masyarakat atas praktik politik identitas, setiap individu di masyarakat akan terpolarisasi berdasarkan kubu-kubu yang saling melakukan konflik yang nantinya dapat mengakibatkan upaya-upaya demonstrasi dan aksi-aksi fanatik.

II. METODE

Jurnal ini menggunakan metode kualitatif yaitu studi pustaka (library research) metode dengan pengumpulan data serta cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut dikelompokkan menjadi data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh dari buku dan jurnal, sedangkan data sekunder dari artikel berita yang diterbitkan di internet. Dengan menggunakan cara mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya. (Zed, 2004).

Dari uraian di atas penulis dapat merumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama (1) Apakah Pengaruh Agama Mengancam Persatuan dan Kesatuan NKRI?; (2) Apa saja faktor yang muncul dari pengaruh agama pada pemilihan Presiden Tahun 2024?

III. HASIL & PEMBAHASAN

Pemilu merupakan proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin nasional. agama memiliki peran dalam mempengaruhi proses pemilu, khususnya terhadap masyarakat Indonesia yang beragam. Media, konsultan bisnis, dan influencer media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Namun, rendahnya tingkat selektif di media sosial, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya kesadaran nasional berkontribusi pada

kompleksitas proses pemilu. Selain itu, penegakan hukum seringkali lemah, sehingga dapat melemahkan integritas pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa pemilu harus diselenggarakan secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

sentimen keagamaan merupakan isu yang sangat sensitif dalam politik Indonesia saat ini, sehingga memicu respon cepat dari masyarakat. Isu keadilan dan penodaan agama terus-menerus diungkap ke publik dengan menggolongkan dukungan dari beberapa pribadi yang memiliki kesamaan. Politik identitas terbukti efektif dalam meraih kekuasaan, terutama jika menggunakan agama sebagai alat. Namun, pengendalian yang ketat sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap persatuan dan kohesi nasional di Indonesia (Rahman, 2020).

A. Apakah Pengaruh Agama Mengancam Persatuan dan Kesatuan NKRI?

Pertanyaan ini selalu menjadi perdebatan yang kompleks dan sangat sensitif di Indonesia. Pengaruh agama terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam suatu negara dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Di satu sisi, agama berpotensi mempersatukan masyarakat Indonesia karena semua agama mengajarkan nilai moral, etika pergaulan, dan keadilan. Di sisi lain, sentimen keagamaan telah menjadi isu sensitif dalam politik Indonesia saat ini sehingga memicu respon cepat dari masyarakat.

Isu keadilan dan penodaan agama secara konsisten digunakan untuk menggolongkan dukungan dari beberapa golongan yang memiliki kesamaan. Politik identitas berperan penting dalam pengaruh agama karena terbukti efektif dalam meraih kekuasaan, terutama jika menggunakan agama sebagai dalih. Namun, pengendalian yang ketat sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap persatuan dan kohesi nasional di Indonesia (Rahman, 2020). Di Indonesia, agama-agama yang ada juga dapat menjadi inspirasi atau pedoman kerja sama, perdamaian, dan toleransi antar agama. Berdasarkan catatan sejarah perjalanan bangsa, peran dominan Islam dalam politik Indonesia relatif damai dibandingkan negara-negara seperti Iran atau Mesir. Para

pengamat mencatat bahwa Indonesia adalah contoh positif dalam melawan stigma bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi sekuler (George, 2017).

Demokrasi dalam ajaran Islam tercermin sebagai suatu sistem yang mewujudkan ajaran Islam dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan untuk berkonsultasi. Misalnya, “Urusan mereka diputuskan berdasarkan musyawarah di antara mereka” (Quran 42:38), yang disebut sebagai ciri masyarakat beriman. “Bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala hal” merupakan perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, “Musyawarah tidak akan gagal.” dalam ajaran Kristen tercermin juga sebagai sistem demokrasi, seperti terpilihnya Matias menggantikan Yudas sebagai salah satu murid Yesus, yang didahului dengan proses pencalonan calon dari antara 120 orang yang hadir di Yerusalem. Mereka mencalonkan dua nama, kemudian setelah berdoa dan memberikan suara, terpilihlah Matius (Kisah Para Rasul 1:15-26).

Agama memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, baik sebagai identitas maupun dalam interaksi sosial. Namun, penggunaan agama untuk kepentingan politik dapat memicu konflik dan memecah belah umat. Meskipun prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan persatuan, namun tantangan dari ekstremisme dan intoleransi antar agama mengancam stabilitas sosial dan politik. Nilai-nilai moral dan etika dalam agama penting dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat, tetapi perlu dipromosikan nilai-nilai toleransi dan dialog antaragama untuk memastikan kontribusi positif agama terhadap persatuan NKRI tanpa mengorbankan kebebasan beragama.

Bagi masyarakat Indonesia, memiliki kesadaran bahwa negara ini memiliki berbagai agama dan kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Dengan demikian, prinsip Bhinneka Tunggal Ika ("berbeda tetapi tetap satu") menjadi dasar untuk persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Namun, tantangan akan timbul ketika

ekstremisme, fanatisme, dan intoleransi antar agama berkembang, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik di Indonesia.

Agama sebagai sumber nilai-nilai moral dan etika yang membentuk perilaku setiap individu dan masyarakat. pemerintah memiliki peran penting dalam proses penerapan nilai-nilai moral dan etika di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat integritas dan tanggung jawab dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, sangat penting bagi para pemerintah, lembaga agama, dan seluruh masyarakat untuk terus mengamalkan serta melakukan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan komunikasi antar agama juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengaruh agama dapat berkontribusi dalam persatuan dan kesatuan NKRI tanpa mengorbankan kebebasan untuk beragama dan berkepercayaan.

B. Apa saja Faktor yang Muncul dari Pengaruh Agama pada Pemilihan Presiden Tahun 2024?

Tidak lama lagi, tepatnya tahun 2024 Indonesia akan kembali melaksanakan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029, kelihatannya isu-isu politik identitas ini masih ingin dimainkan oleh segelintir wirausahawan politik. Muatan bernada “Politik identitas” selalu menjadi topik hangat yang mendampingi berita tentang pemilihan umum, mulai dari salah satu stasiun televisi dalam sebuah tayangan azan tampil salah satu yang digadang-gadang menjadi calon presiden 2024, isu kampanye yang muncul dari tempat ibadah, dan sebagainya.

Ada beberapa pengaruh agama terhadap pemilihan presiden di Indonesia yang dapat menjadi faktor signifikan. Faktor-faktor yang terindikasi muncul dari pengaruh agama terhadap pemilihan presiden di 2024 diantaranya, yaitu:

1. Identitas Spiritualitas Agama Paslon yang Kuat

Masing-masing kandidat memiliki identitas agama yang sama, yaitu beragama Islam, semakin kuat kedekatan spiritualitas kandidat maka kandidat tersebut dapat memperoleh dukungan yang sangat besar dari pemilih yang sebagian besar teridentifikasi dengan agama

tersebut. Media berita yang menyebarkan hal berbau nilai spiritualitas kandidat juga turut menjadi faktor pendukung masyarakat terbuai dengan narasi yang dibuat yang menjadikan masyarakat berubah menjadi simpatisan.

2. Dukungan dari Komunitas Agama Tertentu

Dukungan dari komunitas agama juga termasuk sebagai salah satu faktor pengaruh agama dalam pemilihan presiden karena dukungan dari ormas Islam atau organisasi Kristen tertentu dapat menguntungkan kandidat. Promosi kandidat dari tokoh agama juga dapat mempengaruhi pandangan pemilih melalui pandangan agama dalam pemilihan presiden. Sentimen agama dalam politik identitas menjadi hal yang sering dikaitkan karena para pemilih akan memilih sesuai dengan afiliasi agama mereka. Terutama hal ini akan berlaku pada daerah di negara Indonesia yang mayoritas nya adalah pemeluk agama yang terafiliasi dengan kandidat presiden tersebut.

3. Rekam Jejak Paslon terhadap Agama

Sentimen agama yang kuat akan sangat membantu untuk kandidat tersebut terpilih oleh pemeluk agama tersebut, terutama jika kandidat dianggap oleh para pemilih sebagai wakil dari agama tertentu ataupun pelindung agama tertentu. Rekam Jejak para kandidat selama ini sebagai politisi juga dapat menentukan pengaruh agama terhadap masa pemilu yang ada. Misalnya, rekam jejak yang penuh dengan kedekatan individu kandidat dengan agama dapat menjadi bahan utama sebagai kampanye pemilu, Politisasi Agama melalui sosial media ataupun media masyarakat juga berdampak kuat, ataupun ujaran kebencian antara kandidat dalam mencari kesalahan yang berhubungan dengan penistaan agama.

4. Partai Pendukung/Koalisi

Partai pendukung atau koalisi merupakan gabungan dari partai politik yang bertujuan dalam mendukung kandidat presiden dan wakil presiden pada saat pemilu. terdapat beberapa contoh kerjasama partai pendukung yang terjadi saat ini seperti KP3, KIH, KKIR, dan KKP. Koalisi terdiri dari beberapa partai politik yang bergabung

untuk mendukung masing-masing kandidat. Sebagai contoh partai yang sedang menjadi topik hangat perbincangan diantaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendukung kandidat (03) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendukung kandidat 02, partai PKS dan PKB mendukung kandidat 01. Dari partai koalisi tersebut banyak memiliki pengikut dengan simbol komunitas agama tertentu, maupun terafiliasi oleh daerah tertentu di Indonesia. Pada pemilu presiden di tahun 2024 ini agama dapat menjadi pengaruh dan berperan penting dalam pembentukan suatu partai pendukung atau koalisi. Di berbagai negara seperti Indonesia, agama menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi dan pembentukan aliansi politik. Partai pendukung/koalisi ini dapat terbentuk karena calon presiden yang mereka dukung memiliki nilai-nilai atau ada kepentingan agama mereka dalam visi misi calon presiden tersebut. Sementara agama dapat memainkan peran dalam pembentukan koalisi politik, penting juga bagi para partai pendukung/koalisi tersebut untuk memperhatikan kebutuhan untuk menjaga keharmonisan dan kesatuan di antara masyarakat yang memiliki kepercayaan agama yang beragam dan untuk menjamin kemajemukan dan membantu mengatasi konflik antar agama perlu dilakukan perkembangan-perkembangan ideologi negara dan pengembangan keutuhan dan penyatuan negara, dan pengembangan ini berkaitan pada pluralisme agama beserta multikulturalisme. dalam hal ini agama dapat membantu menghargai kemajemukan serta membangun hubungan yang baik antara bangsa dan agama.

C. Solusi Pencegahan Dampak Buruk Pengaruh Agama terhadap Pemilu

Solusi dari pencegahan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pengaruh agama terhadap pemilu dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, sbb:

- 1) Pencegahan politisasi agama, dapat dilakukan dengan 3 aspek, yaitu aspek pencegahan, aspek penindakan, dan aspek penyelesaian. Pencegahan tersebut juga dapat dicegah dengan

penguatan literasi politik beserta sadar akan keberagaman di Indonesia.

- 2) Pancasila sebagai dasar yang kokoh bagi negara demokrasi yang menghargai adanya pluralisme dalam beragama
- 3) Edukasi kepada masyarakat terkait nilai-nilai toleransi dan batasan terhadap agama dengan politik dibangun oleh pemerintahan melalui norma-norma yang berlaku.
- 4) Pembentukan karakter dan watak masyarakat sejak dini tentang keberagaman di negara demokrasi, agar setiap umat dari generasi ke generasi damai hidup dalam kemajemukan.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Agama memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pemilihan umum/pemilu di Indonesia. Agama tidak hanya menjadi identitas personal, tetapi juga mempengaruhi preferensi pemilihan para pemilih dalam memilih pemimpin negara dan partai politik.
2. Agama memiliki fungsi yang mulia, dapat menjadi inspirasi untuk kerjasama, perdamaian, dan toleransi tetapi jika agama digunakan untuk kepentingan politik itu akan menjadi tantangan yang cukup menyulitkan terhadap persatuan dan kesatuan di Indonesia. Penggunaan agama dalam politik dapat memecah belah masyarakat.
3. Politik identitas yang dimana salah satunya menggunakan agama sebagai penarik perhatian dan hak pilih para pemilih dapat menimbulkan diskriminasi, radikalisme, dan pemisahan terhadap masyarakat serta menghancurkan persatuan dan kesatuan negara.

B. Saran

1. Dalam pemilu 2024 pun pengaruh agama dalam pemilihan calon presiden memiliki pengaruh yang cukup besar, sehingga masyarakat

harus lebih bijak dalam memilih seorang pemimpin karena setiap pilihan akan berpengaruh terhadap masa depan negara.

2. Di Indonesia agama memiliki fungsi penting dalam keberlangsungan hidup setiap orang yang memiliki kepercayaan. Setiap individu pun memiliki kepercayaan yang berbeda beda sehingga setiap masyarakat harus menumbuhkan rasa toleransi, kerjasama, dan perdamaian yang tinggi terlebih lagi pada masa pemilu agar persatuan di indonesia tidak mudah terpecah belah akibat adanya keterkaitan agama dalam berpolitik.
3. Politik identitas sudah tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan agama sehingga hal tersebut sering memunculkan sikap diskriminasi, radikalisasi, dan pemisah terhadap masyarakat serta menghancurkan persatuan dan kesatuan negara. Oleh karena itu, setiap masyarakat diharapkan dapat selalu menjunjung tinggi nilai persatuan antara satu sama lain tanpa membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdallah. (2020, December 14). Agama Rentan Jadi Komoditas Politik. PPIM UIN Jakarta. Retrieved March 21, 2024, from <https://ppim.uinjkt.ac.id/2020/12/14/agama-rentan-jadi-komoditas-politik/>
- Agus, B. (2006). Agama dalam kehidupan manusia: pengantar antropologi agama. Rajagrafindo Persada.
- Al-Farisi, L. S. (2018, Februari Jumat). POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila. JURNAL ASPIRASI, 1(1), 77-90. <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/54/25>
- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. (2023, August Senin). Apasih Politik Identitas Itu? Kesbang Jogja. Retrieved March 20, 2024, from <https://kesbang.jogjakota.go.id/detail/index/28506>
- ceicilia. (2023, mei). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Masyarakat Pada Pemilihan Umum. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Masyarakat Pada Pemilihan Umum. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/216/118/1560>
- Febriani, A. R. (2022, December 29). Apa Itu Politik Identitas? Ini Pengertian beserta Contoh Nyatanya. Retrieved March 20, 2024, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6487494/apa-itu-politik-identitas-ini-pengertian-beserta-contoh-nyatanya>
- indar arifin. (2022, mei). agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpes, sebagai sebuah realitas politik di indonesia. agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpes, sebagai sebuah realitas politik di indonesia. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/download/1706/1301>

Jurnal Hasil Riset. (2016). PENGERTIAN AGAMA MENURUT PARA AHLI. E-JURNAL. Retrieved March 21, 2024, from <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-agama-menurut-para-ahli.html>

KATADATA. (2023, October 25). Ini Peta Koalisi Pemilu 2024 setelah PSI Dukung Prabowo-Gibran. Databoks. Retrieved March 21, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/25/ini-peta-koalisi-pemilu-2024-setelah-psi-dukung-prabowo-gibran>

Maarif, A. S. (2010). Politik identitas dan masa depan pluralisme kita. Pusat Studi Agama dan Demokrasi.

MERDEKA.COM. (2017, December 26). 5 Faktor bikin politik identitas 'subur' di Indonesia. Merdeka.com. Retrieved March 20, 2024, from <https://www.merdeka.com/politik/5-faktor-bikin-politik-identitas-subur-di-indonesia.html>

Nurhaidah. (2019, Agustus Selasa). PENGARUH ISU AGAMA TERHADAP MENINGKATNYA PARTISIPASI PEMILIH PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH SELAT, 63. Retrieved March 21, 2024, from <https://repository.ar-raniry.ac.id/13767/1/Nurhaidah%2C%20160801043%2C%20FISIP%2C%20IP%2C%20081260281572.pdf>

nur khasanah. (2019, desember). relasi agama dan demokrasi telaah kritis partai islam indonesia. relasi agama dan demokrasi telaah kritis partai islam indonesia, 6. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/13745/pdf>

parinduri, a. (2023, agustus). POLITIK IDENTITAS AGAMA SEBAGAI TANTANGAN PELAKSANAAN PESTA DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 2024: STUDI KASUS PILKADA DKI JAKARTA 2017 & PILPRES 2019. POLITIK IDENTITAS AGAMA SEBAGAI TANTANGAN PELAKSANAAN PESTA DEMOKRASI DI INDONESIA

TAHUN 2024: STUDI KASUS PILKADA DKI JAKARTA 2017
& PILPRES 2019, 7. e-Journal:
<http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd> 1e
mail:mukadimah@fkip.uisu.ac.id

perdana, a. p. (2023, agustus jumat). dampak politik idntitas pada pemilihan umum 2024 mendatang. dampak politik idntitas pada pemilihan umum 2024 mendatang. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/download/400/233>

shodiq, j. (2012, maret). PERSINGGUNGAN KONSEP PEMILU DI INDONESIA DENGAN PEMIKIRAN POLITIK DALAM ISLAM. PERSINGGUNGAN KONSEP PEMILU DI INDONESIA DENGAN PEMIKIRAN POLITIK DALAM ISLAM, 9, 136. <https://jurnalhukum.unisla.acid/index.php/independent>

TIRTIO.ID. (2021, March 2). Apa Itu Agama Menurut Para Ahli: Sejarah, Macam, & Perkembangan. Tirto.id. Retrieved March 20, 2024, from <https://tirto.id/apa-itu-agama-menurut-para-ahli-sejarah-macam-perkembangan-gaHK>

wingarta, p. s. (n.d.). PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA. PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/419/290/>.